

PERIHAL : PENGUJIAN MATERIEL PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PRESIDEN PRABOWO YANG BERWENANG PILIH KPK

Surakarta, 4 November 2024

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Dengan hormat,

Perkenan Kami di bawah ini :

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) beralamat kedudukan hukum di Jl. Budi Swadaya 43, RT. 015 RW. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP 081282822884., diwakili oleh :

- a. Nama : **BOYAMIN BIN SAIMAN**
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : **Koordinator** dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
Alamat : Ngoresan, RT 001/ RW 022, Kel./Desa Jebres, Kota Surakarta

REGISTRASI	
NO.	163/PUU-XXII/2024
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>18 November 2024</i>
Jam	: <i>10:00 WIB</i>

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3372022007680002
Email : minboya88@gmail.com
Nomor HP : 081218637589

b. Nama : **SUPRIYADI.**
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
Alamat : Jl. Budi Swadaya 43, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 330502080210001
Email : minboya88@gmail.com
Nomor HP : 081222282800

Selanjutnya mohon disebut sebagai
PEMOHON

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) (Selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28D ayat (1,2,3) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dengan uraian sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (“selanjutnya cukup disebut Undang-undang Mahkamah Konstitusi”).
- 2) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
- 3) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), menjelaskan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- 5) Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. OBJEK PERMOHONAN

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya dapat disebut UU KPK), yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 30

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Terhadap :

Pasal 1 Ayat (3) , Pasal 27 Ayat (1) , Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

- 1) Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-

undang terhadap terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021).

- 2) Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak -hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

- 3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah badan hukum Perkumpulan (akta pendirian MAKI vide Bukti P-1) yang bergerak bidang pemberantasan korupsi sehingga merasa telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku untuk peduli akan sah dan legalnya Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK melalui proses seleksi, pemilihan dan pelantikan yang kredibel.

Kerugian Konstitusional Pemohon.

1. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 - (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum Perkumpulan (akta pendirian MAKI vide Bukti P-1) yang bergerak bidang pemberantasan korupsi sehingga merasa telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku untuk peduli akan sah dan legalnya Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK melalui proses seleksi, pemilihan dan pelantikan yang kredibel;
 3. Bahwa keinginan Pemohon untuk mendapatkan legalitas sah Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 haruslah melalui sarana yang benar dan sah yaitu orang-orang yang akan mendaftar calon Dewan Pengawas KPK terhadap Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subiyanto berdasar Undang-Undang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ tahun 2002;
 4. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk WNI yang mendaftar kepada Pansel KPK yang sah bentukan Presiden Prabowo akan gagal dikarenakan saat ini DPR telah menerima hasil Pansel bentukan Presiden Jokowi dan apabila dibiarkan maka DPR dapat dipastikan akan melakukan pembahasan dan pemilihan 5 (lima) orang dari 10 orang hasil Pansel KPK untuk disetujui menjadi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK;

5. Bahwa Pemohon dirugikan apabila Presiden Prabowo Subiyanto tidak membentuk Pansel Capim dan Cadewas KPK dikarenakan WNI yang memenuhi syarat tidak dapat mengajukan diri sebagai calon , sementara Pemohon berkeyakinan hanya Presiden Prabowo Subiyanto yang berwenang membentuk Pansel dan menyerahkan hasilnya kepada DPR;
6. Bahwa berdasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117 yang berwenang membentuk Pansel dan mengirimkan hasil Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK kepada DPR adalah Presiden periode 2024-2029, hal ini berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117 alinea terakhir dan halaman 118 alinea pertama yang berbunyi :

Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa

jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029).

7. Bahwa Boyamin Saiman pada tanggal 2 Oktober 2024 telah berkirin surat Somasi kepada Presiden Joko Widodo yang berisi larangan kepada Presiden Jokowi untuk mengirimkan hasil Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029 (Bapak Prabowo Subianto). Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117-118 , namun demikian pada tanggal 15 Oktober 2024 Presiden Jokowi nekat tetap mengirimkan hasil Pansel bentukannya kepada DPR-RI (<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/jokowi-sudah-kirim-surat-presiden-tentang-capim-dan-dewas-kpk-ke-dpr>)
8. Bahwa terdapat WNI yang memenuhi syarat tidak mendaftarkan diri menjadi calon Anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 kepada Pansel yang dibentuk Bapak Joko Widodo (Presiden 2019-2024) dikarenakan

Presiden Joko Widodo (periode 2019-2024) tidak berhak dan tidak berwenang membentuk Pansel Capim KPK dan Cadewas KPK sekaligus tidak berhak dan tidak berwenang menyerahkan kepada DPR-RI hasil Pansel Capim KPK dan Cadewas KPK.

9. Bahwa Boyamin Saiman pada tanggal 22 Oktober 2024 telah berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subiyanto untuk mengajukan permohonan pembentukan Pansel KPK dengan maksud hendak mengajukan mendaftarkan diri menjadi calon Dewan Pengawas KPK. Boyamin Saiman akan mendaftarkan diri menjadi calon Anggota Dewan Pengawas KPK karena hanya Presiden periode 2024-2029 (Bapak Jenderal TNI (HOR) (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo) yang berhak dan berwenang membentuk Pansel Capim KPK dan Cadewas KPK sekaligus menyerahkan kepada DPR-RI periode 2024-2029.
10. Bahwa Boyamin Saiman telah menyampaikan hal penting untuk menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto atas keabsahan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dikarenakan jika tidak sah maka akan menjadi obyek gugatan Praperadilan oleh pelaku korupsi yang dibidik oleh KPK. Tersangka korupsi dapat dipastikan akan melakukan gugatan Praperadilan untuk membatalkan status Tersangkanya dengan alasan penetapan Tersangka tidak sah dikarenakan dilakukan oleh Pimpinan KPK yang dihasilkan oleh proses yang tidak sah dan Saya yakin suatu saat akan ada Hakim yang mengabulkan gugatan ini;
11. Bahwa tidak absahnya Pimpinan KPK dalam hal ini karena dibentuk Pansel dan diserahkan kepada DPR oleh Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2024. Berdasar Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 112 tahun 2022 menyatakan dengan jelas bahwa Pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 haruslah dibentuk Pansel dan diserahkan kepada DPR oleh Presiden periode 2024-2029 sehingga dengan demikian produk Presiden Jokowi adalah tidak sah;

12. Bahwa Presiden Prabowo Subianto semestinya membentuk Panitia Seleksi calon Pimpinan dan Dewas KPK tersendiri dan menyerahkan hasilnya kepada DPR tanpa terikat dengan produk Pansel yang dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk mencegah permasalahan hukum yang harus dihadapi KPK periode 2024-2029. Produk Presiden Jokowi jika diteruskan oleh DPR dan dilantik menjadi Pimpinan/Dewas KPK periode 2024-2029 juga akan menimbulkan permasalahan konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi ;
13. Bahwa dengan berlakunya Pasal 30 Ayat (1) kata “ Presiden” tanpa dimaknai Presiden yang periodenya sama dengan Capim dan Cadewas KPK maka akan merugikan Pemohon yaitu tidak dapat menjadi Dewas KPK yang sah dan berkepastian hukum sehingga tidak akan berdampak dibatalkan oleh proses hukum dalam bentuk digugat keabsahannya ke PTUN dan atau MK ;
14. Bahwa kerugian Pemohon akan hilang apabila Pasal 30 Ayat (1) kata “Presiden” dimaknai adalah Presiden RI yang periode masa jabatan akan sama dengan Capim dan Cadewas KPK setelah dilantik pada akhir Desember 2024 ;
15. Bahwa dengan dimaknainya kata “ Presiden “ adalah

Presiden yang bersamaan dengan periode KPK maka akan diperoleh secara sah dan legal Capim KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 dikarenakan akan dibentuk Panitia Seleksi KPK oleh Presiden Prabowo Subiyanto;

16. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah melanggar, merugikan hak konsitusional WNI yang memenuhi syarat sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

Pasal 1

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28l

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

17. Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasar Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sehingga semua hal harus berdasar hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Azas-azas hukum adalah termasuk diantaranya adalah azas keabsahan dan azas kepastian hukum yang berkeadilan sehingga penyelenggaraan akan selalu patuh untuk melaksanakan konstitusi, Undang-Undang dan segala peraturan yang berlaku termasuk Putusan-Putusan yang diketok oleh Mahkamah Konstitusi. Negara/Pemerintah harus tunduk pada hukum tanpa kecuali guna mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 2) Bahwa A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of

Law”, yaitu: 1. Supremacy of Law. 2. Equality before the law. 3. Due Process of Law. Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. *Negara harus tunduk pada hukum.*
 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- 3) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara;
- 4) Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due*

process of law). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

- 5) Bahwa John Rawls di dalam bukunya *A Theory of Justice* (Pustaka Pelajar: 2011) menyatakan bahwa keadilan sebagai *fairness*. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Bertindak sewenang-wenang (Pemohon: atas nama undang-undang) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.
- 6) Bahwa salah satu keadilan dan kepastian hukum yang perlu secara jelas diatur adalah masa jabatan publik. Van Vollenhoven mengemukakan masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya. Masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung

penafsiran lain apalagi bertentangan dengan ketentuan lainnya;

- 7) Bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam Pasal 34, selanjutnya amanat tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
- 8) Bahwa KPK sebagai Lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara luar biasa, perlu dilandasi dengan norma kelembagaan, dan proses kerja yang harus berkepastian tidak menimbulkan tafsir lainnya atau dapat ditafsir yang berbeda. Pemilihan Calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK yang bersifat independent haruslah berdasar hukum termasuk kepastian hukum, sehingga apabila ingkarinya maka akan dapat menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan diskriminasi yang dapat mengganggu Keindependensian dan kinerja KPK.
- 9) Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 30 Ayat (1) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang bunyi lengkapnya :
 1. *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.*
- 10) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan masa jabatan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK adalah selama 5 tahun (sebelumnya 4 tahun) dengan berbagai pertimbangan

yang salah satunya untuk independensi KPK maka pemilihannya hanya dilakukan sekali oleh Presiden dan DPR dan Presiden Jokowi telah melakukannya tahun 2019 sehingga untuk Pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 semestinya hanya dilakukan oleh Presiden Prabowo Subiyanto. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117 alinea terakhir dan halaman 118 alinea pertama yang berbunyi :

Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas

setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029).

- 11) Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 maka pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 haruslah oleh Presiden periode 2024-2029 (Prabowo Subiyanto) yang sekaligus Presiden Prabowo Subiyanto yang menyerahkan hasil Pansel aquo kepada DPR-RI periode 2024-2029 untuk dibahas dan disetujui sebanyak 5 orang untuk kemudian dilantik menjadi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029.

- 12) Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, DPR-RI telah menerima 10 orang calon Pimpinan KPK dan 10 orang Calon Dewan Pengawas KPK yang diserahkan Presiden Joko Widodo berdasar hasil Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. DPR berpotensi akan mengesahkan calon-calon yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo yang mana jelas-jelas bertentangan dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022;

- 13) Bahwa untuk terpenuhinya keinginan Pemohon untuk mendapatkan calon Pimpinan dan Dewas KPK secara sah dan kredibel maka diperlukan pemaknaan kata “ Presiden “ oleh Mahkamah Konstitusi yaitu yang bersamaan periodenya dengan Pimpinan dan Dewas KPK yang akan dipilih dan dilantik ;

- 14) Bahwa untuk memastikan proses pemilihan dan pengesahan capim dan cadewas KPK serta pelantikannya sah dan kredibel maka diperlukan pemaknaan kata “ Presiden “ oleh Mahkamah Konstitusi yaitu yang bersamaan periodenya dengan Pimpinan dan Dewas KPK yang akan dipilih dan dilantik;
- 15) Bahwa untuk memastikan dipatuhinya ketentuan Presiden hanya sekali melakukan seleksi Capim dan Cadewas KPK serta menyerahkan hasil Pansel kepada DPR maka diperlukan Putusan Mahkamah Konstitusi secepatnya dan sesingkat-singkatnya;

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah sampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan kata “ Presiden “ pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “ *Presiden yang masa jabatannya sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK* ”;

3) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

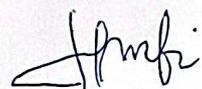
Sekian dan Terima Kasih.

Hormat Kami

Pemohon



BOYAMIN BIN SAIMAN, SH.



SUPRIYADI